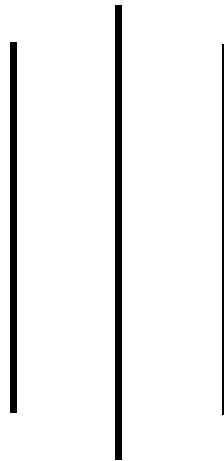




**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATU BARA**  
**TAHUN 2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATU BARA**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 55 LIMA PULUH - 21255

## DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum .....	2
3. Maksud dan Tujuan .....	3
4. Stuktur Organisasi .....	4
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
6. Sumber Daya .....	6
7. Strategi dan Kebijakan.....	9
8. Isu-isu Strategis .....	11
B. Sistematika Penyusunan .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Kerja.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Realisasi Anggaran.....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2. Langkah-Langkah Strategis.....	52

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bermaksud untuk memberikan informasi terkait capain kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dalam meberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaksanaan penanaman modal, serta permasalahan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 untuk masa yang akan datang, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Lima Puluh, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Batu Bara



Murdi Sima, S.STP  
Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 197606021996121002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan Penetapan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan

Dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam memberikan Pelayanan dibidang Investasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan serta Pelayanan Perizinan Berusaha. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara berusaha ikut membantu tata kelola ekonomi daerah dengan meningkatkan efisiensi pengurusan izin yang akan memberikan dampak

positif terhadap perkembangan dunia usaha di Kabupaten Batu Bara. Memberikan kemudahan kepada masyarakat, pelaku usaha dalam hal pelayanan investasi maupun pelayanan perizinan dan non perizinan serta perizinan berusaha diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batu Bara.

## **2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dsan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2025 tentang Indikatro Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dalam upaya memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

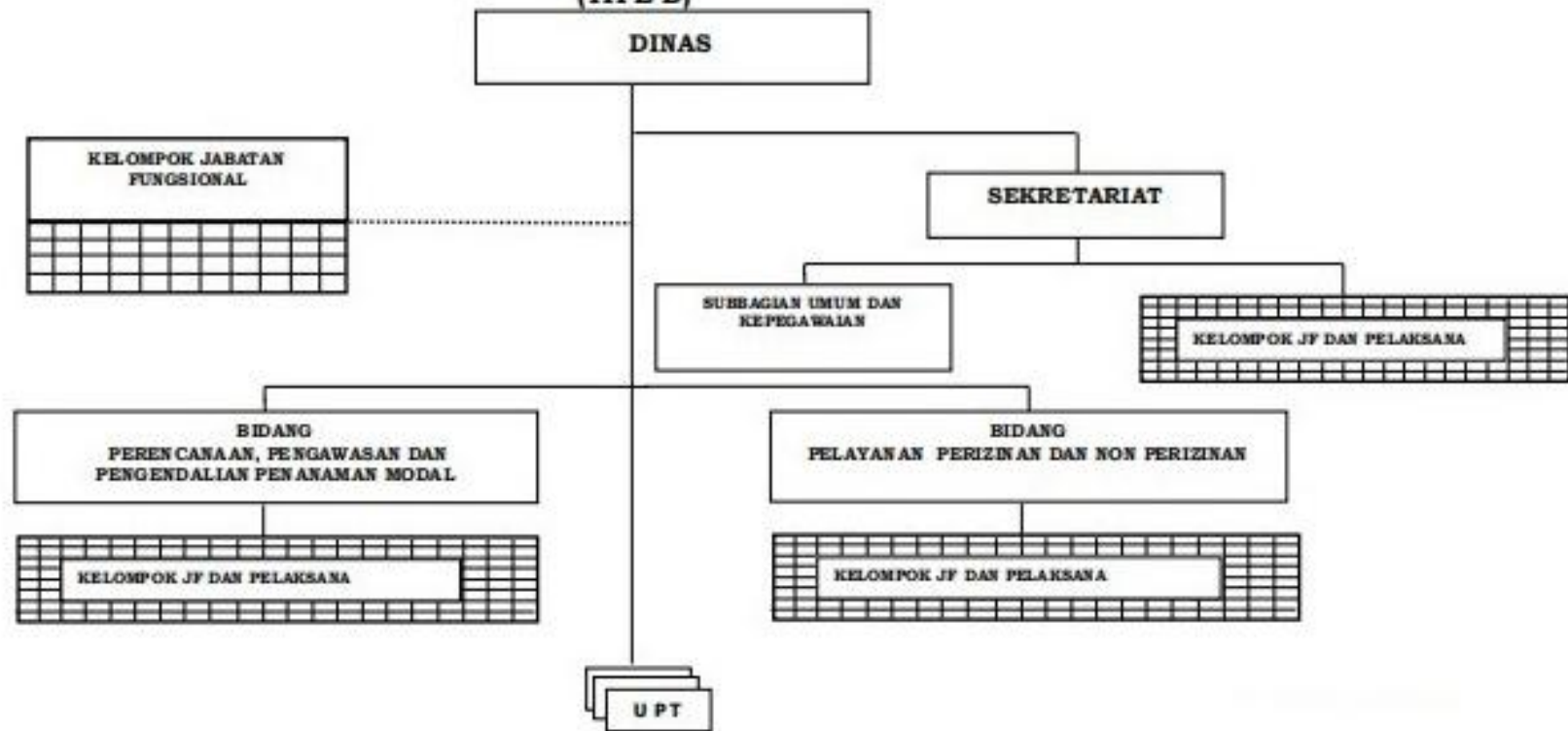
#### **4. Struktur Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dengan susunan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rincian tugas dan fungsi Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yaitu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.

Adapun Susunan Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Batu Bara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA  
(TIPE B)**



## 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan investasi, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah dibidang penanaman modal dan perizinan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## 6. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu SDM dan sarana prasarana. Kondisi saat ini sumber daya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	:	1	Orang
b.	Sekretariat	:		Orang
	– Sekretaris		1	Orang
	– Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	Orang
	– Analis Tata Usaha		1	Orang
	– Analis Perencanaan		1	Orang
	– PPPK PW		3	Orang
	– Ketua Tim Substansi Keuangan dan Program		1	Orang
	– Bendahara		2	Orang
	– PPPK PW		2	Orang
c.	Bidang Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			Orang
	– Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Substansi Pengolahan Data dan Informasi		1	Orang
	– Analis Kebijakan Ahli Muda		1	Orang
	– PPPK PW		3	Orang

d.	Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan		Orang
	– Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pengaduan	1	Orang
	– Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Orang
	– Penata Perizinan Ahli Muda	2	Orang
	– Penata Perizinan Ahli Pertama	2	Orang
	– PPPK PW	4	Orang

### Komposisi Pegawai

#### a. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	0	
3.	Eselon III / JFT	3	
1.	Eselon IV	1	
2.	Ketua Tim	4	
3.	JFT / Ketua Tim	3	
4.	JFT	1	
5.	Staf	2	
6.	PPPK PW	12	

#### b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	SLTA	4	1 orang PNS, 4 orang PPPK PW
2.	D1	1	1 PPPK PW
3.	D3	1	1 orang PNS
4.	S1	19	11 orang PNS, 8 orang PPPK PW
5.	S2	2	2 orang PNS
6.	S3	0	0

c. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan	2 Orang	PPPK PW
2.	IV	13 Orang	
3.	Golongan	- Orang	
4.	III	-	
5.	Golongan II Golongan I NonGolongan	12 Orang	
	Jumlah	27Orang	15 orang PNS, 12 PPPK PW

d. Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASAKERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	0 tahun/d10 tahun	14 Orang	5 PNS, 9 PPPK PW
2.	11 tahun s/d 15 tahun	7 Orang	6 PNS, 1 PPPK PW
3.	16 tahun s/d 20 tahun	3 orang	1 PNS, 2 PPPK PW
4.	21 tahun s/d 25 tahun	-	-
5.	26 tahun s/d 30 tahun	2 Orang	PNS
6.	31 tahun s/d 40 tahun	1 Orang	PNS
	Jumlah	27 Orang	

e. Berdasarkan Jenis kelamin

NO	Jeniskelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	19 Orang	12 orang PNS, 7 orang PPPK PW
2.	Perempuan	8 Orang	3 orang PNS, 5 PPPK PW
	Jumlah	27 Orang	

Sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang diperoleh melalui pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan APBD Kabupaten Batu Bara untuk menunjang operasional pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Pengadaan sarana untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara

## **7. Strategi dan Kebijakan**

### **a. Strategi**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya – upaya menyeluruh dan terintegrasi dan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA
- b. Penyediaan peta potensi investasi
- c. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik dan investasi
- e. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal
- f. Peningkatan manajemen kinerja sesuai standart

### **b. Kebijakan**

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan yang menggambarkan program dan langkah – langkah kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, yaitu:

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Meningkatkan Produk Modal Tetap Bruto	Meningkatnya Investasi Daerah	Peningkatan Nilai Investasi PMDN dan PMA	Meningkatkan realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan Bimbingan teknis/sosialisasi, dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
			Meningkatkan iklim Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal sehingga para pelaku usaha semakin produktif dalam mengembangkan Usahanya
			Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal melalui penyediaan peta potensi investasi
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta perizinan berusaha sesuai dengan SOP dan aturan
			Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman Modal
			Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik (MPP)

<b>Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.Peningkatan penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum serta pelayanan publik berbasis sistem teknologi informasi dan inovasi Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penanganan pengaduan terkait perizinan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD	Melaksanakan Pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD

## 8. Isu – Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Belum tersedianya peta potensi investasi untuk seluruh sektor dalam bentuk dokumen dan berbasis digital di Kabupaten Batu Bara
2. Belum tersedianya kajian peluang investasi
3. Belum optimalnya promosi investasi dan pengembangan potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Batu Bara
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan investasi dan pelayanan perizinan,

5. Minimnya literasi digital masyarakat terhadap pengurusan perizinan
6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan usahanya;
7. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

## **B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Dalam menyajikan Laporan Kinerja, Sistematis penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

### **Bab I – PENDAHULUAN**

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi organisasi

### **Bab II – PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan , menjelaskan secara ringkas gambaran umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

### **Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja

## **Bab IV – PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan yaitu. Rencana Kerja yang tertuang di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menggambarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 2025. Yang didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, yaitu Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto, dan yang menjadi sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatnya investasi daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai indikator hasil program/kegiatan yang terukur, menggambarkan kinerja utama, dan menjadi dasar evaluasi pencapaian target dalam periode tertentu.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Target Indikator Kinerja Utama  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai peningkatan investasi PMDN dan PMA	Nilai Peningkatan investasi(PMDN dan PMA)
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP OPD

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Tahun 2025

Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output) sesuai Kepmen 900.1-2850	Target Setiap Tahunnya	
		2025	
		Target	Rp.
1	2	3	4
<b>URUSANPEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>4.772.294.534</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>2.345.099.768</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.333.593.423
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	11.506.345
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>24.000.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	24.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Pendukung Kelancaran Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>532.251.421</b>
Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.558.388
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	108.958.039

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	82.938.039
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12 Paket	127.065.000
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	12 Paket	54.631.572
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	41.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	91.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya sarana prasarana pendukung</b>	<b>100%</b>	<b>765.276.245</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	67.200.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	648.076.245
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	50.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>779.177.100</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik Yang Disediakan	12 Laporan	429.287.100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	347.890.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>326.490.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	139.890.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	10 Unit	84.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102.600.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan iklim penanaman modal</b>	<b>100%</b>	<b>108.684.000</b>
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>108.684.000</b>
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108.684.000
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan promosi penanaman modal</b>	<b>100%</b>	<b>2.153.200.000</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase promosi penanaman modal</b>	<b>100%</b>	<b>2.153.200.000</b>
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota	1 Dokumen	2.153.200.000
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>155.800.000</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>155.800.000</b>
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	155.800.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>249.080.000</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>249.080.000</b>

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	49.475.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160 Pelaku Usaha	170.625.000
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	28 Kegiatan Usaha	28.940.000
Jumlah Anggaran			<b>7.439.058.534</b>

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025 Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga seluruh kegiatan akan terarah dengan baik. Adapun penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

### ***Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025***

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai peningkatan investasi PMDN dan PMA	Rupiah	500 Milyard
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangandan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,25)

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam DPA adalah sebagai berikut :

***Tabel Program dan  
Anggaran Tahun 2025***

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.772.294.534	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	108.684.000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	2.153.200.000	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	155.800.000	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	249.080.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	7.439.058.534	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sebelum masuk pada tahapan capaian kinerja, terlebih dahulu kami menjabarkan indikator Kinerja yang digunakan organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja DPMTSP TA. 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai peningkata InvestasiPMDN dan PMA	Rupiah	500 Milyar	887.708.259.190	177,54
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	88,41	102,80
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,25)	BB (76,25)	100

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan yaitu :  $(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Dalam hal ini akan kita evaluasi pencapaian kinerja tersebut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya investasi daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun2025		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Nilai peningkatan investasi PMDN dan PMA	Rupiah	500 Milyard	887.708.259.190	177,54

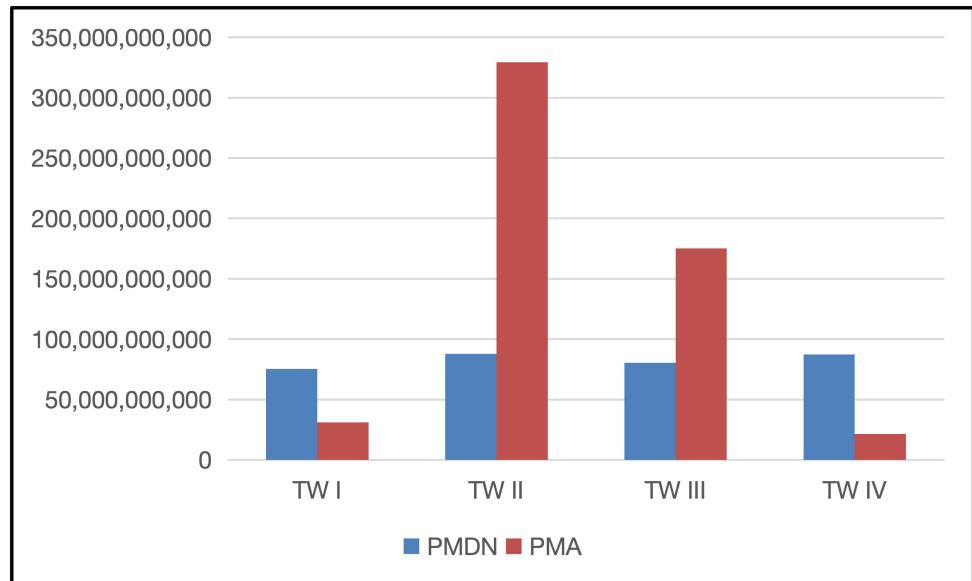
Realisasi investasi tahun 2025 yaitu Rp. 887.708.259.190,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah). Jika dilihat melalui target Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 sebesar 500 milyar rupiah, maka capaian realisasi investasi tahun 2025 sebesar 177,54%.

Perkembangan realisasi investasi penanaman modal tahun 2025 Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

PERUSAHAAN	TRIWULAN I (Rp.)	TRIWULAN II (Rp.)	TRIWULAN III (Rp.)	TRIWULAN IV (Rp.)	JUMLAH
PMDN	75.270.075.583	87.747.826.378	80.295.846.384	87.311.438.904	330.625.187.249
PMA	30.982.572.348	329.418.647.602	175.226.700.908	21.455.151.083	557.083.071.941
Jumlah realisasi investasi PMDN DAN PMA					887.708.259.190

Sumber data : PMDN dan PMA pada LKPM Tahun 2025 yang disampaikan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan tautan <https://oss.go.id> (menu Pelaporan > Laporan LKPM).

Grafik perkembangan realisasi investasi penanaman modal (PMDN dan PMA) tahun 2025 di Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :



Pada tahun 2025 realisasi Investasi di Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 887.708.259.190, Realisasi investasi diperoleh dari 77 perusahaan (PMDN dan PMA) yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2025 melalui Sistem OSS (Online Single Submission).

Perbandingan realisasi dan capaian investasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
b1	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	500 Milyard	450.652.895.722	90,13	500 Milyard	887.708.259.190	177,54

Realisasi nilai peningkatan investasi di tahun 2025 memenuhi dari target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,

Pencapaian kinerja persentase nilai peningkatan investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) didukung dengan adanya pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan rincian realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Persentase  
nilai pemngkatan investasi PMDN dan PMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp )	REALISASI		KINERJA
			(Rp )	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pengendalian Iklim Penanaman Modal	108.684.000	101.626.525	93,51	Meningkatnya iklim penanaman modal
1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	108.684.000	101.626.525	93,51	Tersedianya peta potensi investasi sektor indsutri
1)	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	108.684.000	101.626.525	93,51	Kajian peta potensi investasi sektor pariwisata
II.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	249.080.000	241.380.360	96,9 1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	249.080.000	241.380.360	96,9 1	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
1)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	49.475.000	45.400.000	91,7 6	5 Kegiatan Usaha
2)	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	170.625.000	170.160.360	99,7 3	192 Pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis

3)	Pengawasan Penanaman Modal	28.980.000	25.820.000	89,10	28 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan
III.	Program Promosi Penanaman Modal	2.152.200.000	1.938.514.761	90,03	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.152.200.000	1.938.514.761	90,03	Terselenggaranya promosi penanaman modal
1)	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.152.200.000	1.938.514.761	90,03	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)
	JUMLAH	2.510.964.000	2.281.521.646	90,86	

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi program/kegiatan penunjang capaian indikator tersebut, maka dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun rumus perhitungan efisiensi sumber daya atas kinerja yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja persentase Nilai Investasi PMDN dan PMA terhadap realisasi anggaran

program pengendalian iklim penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sebagai berikut :

	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai peningkatan investasi PMDN dan PMA	500.000.000.000	887.708.259.190	177,54	2.510.964.000	2.281.521.646	90,86	1,77

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja tersebut, yaitu :

1. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha (PMDN dan PMA) di Kabupaten Batu Bara terkait penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
3. Menyusun Peta Potensi investasi Kabupaten Batu Bara
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Batu Bara

**DATA PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN NILAI INVESTASI TAHUN 2025**

NO	NAMA PELAKU USAHA	STATU S	ALAMAT	KELURAHAN / DESA	KECAMATA N	TOTAL TAMBAHAN INVESTASI
1.	ALESHA GEMILANG	PMDN	Dusun I Kampung Jawa	Simodong	Sei Suka	630.000.000
2.	ANDALAN FLUID SISTEM	PMDN	Jl Lintas Sumatera No 91, Dusun Sawo II	Sei Suka Deras	Sei Suka	7.500.000
3.	ANDREW	PMDN	Dusun V Sumber Padi	Kuala Tanjung	Sei Suka	8.100.000.000
4.	ARYA RAMA PERSADA	PMDN	Dusun XII Small Holder	Perjuangan	Sei Balai	-
5.	BAGASTA ABADI SENTOSA	PMDN	Jalan Raya Medan-Kisaran km 110	Sukaraja	Air Putih	249.287.687
6.	BAKRIE FOOD AND ENERGY	PMDN	Jalan Acess Road Inalum Km 15, Desa Lalang Kec. Medang Deras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 21258	Lalang	Medang Deras	45.204.334.414
7.	BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS	PMDN	Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, PKS Kisaran	Perkebunan Sei Balai	Sei Balai	-
8.	BIDADARI MEDIKAL NUSANTARA	PMDN	JL LINTAS SUMATERA KM 108 DUSUN KLEMBIS	Sukaraja	Air Putih	1.059.163.610
9.	BINA USAHA MINERAL INDONESIA	PMDN	Desa Gambus Laut	Lima Puluh Kota	Lima Puluh	-
10.	BINTANG MATAHARI CEMERLANG	PMDN	JL. DATUK LIMA PULUH	Pulau Sejuk	Datuk Lima Puluh	20.000.000
11.	BIYU IYAS MALELA	PMDN	Dusun IV, Desa Tanjung Kasau	Tanjung Kasau	Laut Tador	555.271.630
12.	BUANA SAWIT INDAH	PMDN	DESA PERKEBUNAN PETATAL	Petatal	Datuk Tanah Datar	-
13.	CENTRATAMA MENARA INDONESIA	PMDN	Dusun V	Gambus Laut	Lima Puluh Pesisir	21.008.494
14.	CITRARAYA PERKASA ABADI	PMDN	JL. ACCESS ROAD DUSUN IV	Lalang	Medang Deras	-
15.	DAYA INDAH ANUGERAH	PMDN	MR. DIY Ruko Imam Bonjol Labuhan Ruku Talawi Batubara (XLAW), Jalan Imam Bonjol, Kel. Labuhan Ruku, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara, 21253	Labuhan Ruku	Talawi	963.051.853

16.	DAYA INDAH YASA	PMDN	MR DIY Ruko Sudirman Indrapura Air Putih Batu Bara (XTIH) Jln Jenderal Sudirman	Indrapura	Air Putih	3.121.675
17.	DOMAS SAWITINTI PERDANA	PMDN	Jl. Access Road Inalum KM 15	Lalang	Medang Deras	35.059.137.437
18.	FLORA SAWITA CHEMINDO	PMDN	Jalan Access Road Inalum Km 15	Lalang	Medang Deras	-
19.	HOKI DELAPAN DELAPAN	PMDN		-	-	500.000.000
20.	HONG LIE OLEO CHEMICAL INDONESIA	PMDN	Dusun I Small Holder	Perjuangan	Sei Balai	26.570.000.000
21.	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	JL. RAKYAT LINGKUNGAN VIII TOR5 MDN	Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	149.598.754
22.	INDONESIA ALUMINIUM ALLOY	PMDN	Jalan Access Road Dusun III	Kuala Tanjung	Sei Suka	340.799.942
23.	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM	PMDN	Jl. Access Road	Kuala Tanjung	Sei Suka	114.853.737.730
24.	INSURINDO INTERSERVICES	PMDN	Dusun IV Tanjung Permai Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara	Kuala Tanjung	Sei Suka	11.755.500
25.	INTI BANGUN SEJAHTERA	PMDN	Dusun VII, Desa Antara, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara	Antara	Lima Puluh	-
26.	KARSA PRIMAPERMATA NUSA	PMDN	Jalan Access Road Inalum	Kuala Tanjung	Sei Suka	4.198.200
27.	KARYA PRATAMA NIAGAJAYA	PMDN	Dusun I	Tanjung Seri	Laut Tador	7.005.352.819
28.	KREASIBETON NUSAPERSADA	PMDN	Jl. Lintas Sumatera Km. 108	Sukaraja	Air Putih	-
29.	KUSDARJANTO BUDI PRASETYO	PMDN	Dusun XI (Jarak)	Tanah Tinggi	Air Putih	118.500.000
30.	LILY MARIANA INDERAPURA	PMDN	Jl. Lintas Sumatera Km. 100 Dusun Kandis	Tanjung Gading	Sei Suka	75.000.000
31.	MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY	PMDN	Jln. Mesjid Lk. VI	Indrapura	Air Putih	1.851.099.246
32.	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Jl. Merdeka (AF41)	Bogak	Tanjung Tiram	2.496.713.594
33.	MITRA NIAGA MADANI	PMDN	SHGB 89	Lima Puluh Kota	Lima Puluh	5.000.000.000

34.	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI	PMDN	Dusun VI	Petatal	Datuk Tanah Datar	12.000.000
35.	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Kebun Dusun Hulu	Perkebunan Limau Manis	Lima Puluh	-
36.	PERTAGAS NIAGA	PMDN	Jalan Lintas Sumatera Acces Road Inalum, Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara	Kuala Tanjung	Sei Suka	-
37.	PERTAMINA GAS	PMDN	Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Sei Simujur, Tanjung Sari, Sei Suka Deras, Perkebunan Sipare Pare, Simpang Kopi, Tanjung Gading, Brohol, Pakam Raya Selatan, Pakam Raya, Pakam, Lalang, Kuala Tanjung, Tanjung Kasau	Kuala Tanjung	Sei Suka	59.785.222.220
38.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Perkebunan Dolok	Perkebunan Dolok	Lima Puluh	32.367.134.279
39.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN, INDUSTRI & DAGANG KWALA GUNUNG	PMDN	Desa Perkebunan Kwala Gunung	Perkebunan Kwala Gunung	Lima Puluh	-
40.	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA DISINGKAT PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	PMDN	Pelabuhan Kuala Tanjung, JI Pelabuhan No. 1	Kuala Tanjung	Sei Suka	-
41.	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA	PMDN	Stasiun Sei Bejangkar	Sei Bejangkar	Sei Balai	-
42.	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III	PMDN	Kebun Dusun Hulu	Perkebunan Limau Manis	Lima Puluh	-
43.	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	PMDN	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Sei Suka, Kelurahan/Desa Kuala Indah.	Kuala Indah	Sei Suka	-
44.	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERKEBUNAN SUMATERA UTARA	PMDN	Perkebunan Tanjung Kasau	-	-	-
45.	PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN	PMDN	Dusun IV	Kuala Indah	Sei Suka	20.559.181.000
46.	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	PMDN	Dusun III, Lubuk Besar, Kec. Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara	Lubuk Besar	Datuk Lima Puluh	-
47.	SAMUDERA AGENCIES INDONESIA	PMDN	Jl Access Road Inalum	Lalang	Medang	-

					Deras	-
48.	SAPTA MANUNGGAL JAYA	PMDN	Dusun Umar Palangki	Tanah Merah	Air Putih	1.162.606.396
49.	SARANA INDUSTAMA PERKASA	PMDN	Jl. Access Road Inalum KM 15	Lalang	Medang Deras	674.770.300
50.	SARANA NIAGA PERKASA	PMDN	Dusun I Kuala Makmur	Kuala Tanjung	Sei Suka	-
51.	SARI PINANG MAKMUR	PMDN	Jl. Acces Road	Lalang	Medang Deras	-
52.	SAWIT AGUNG LESTARI	PMDN	Jl. Pelabuhan No. 3	Kuala Tanjung	Sei Suka	-
53.	SELERAN ANAK NUSANTARA	PMDN	Jalan Jendral Sudirman no.370, kota IndraPura , Kabupaten BatuBara	Indrapura	Air Putih	-
54.	SOLUSI BANGUN ANDALAS	PMDN	Jln. Datuk Panglima Tenggara	Kuala Indah	Sei Suka	-
55.	SOLUSI TUNAS PRATAMA	PMDN	Dusun. III	Tanjungmuda	Air Putih	-
56.	SUMATRASARANA SEKARSAKTI	PMDN	Jl. Smelter Site Acces Road Inalum – Dusun IV Tanjung Permai	Kuala Tanjung	Sei Suka	19.518.600
57.	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	( ALFAMART PADANG GENTING - W873 ) - JL SISINGAMANGARAJA	Padang Genting	Talawi	12.724.567.857
58.	SUMBER SAWIT MAKMUR	PMDN	Desa Laut Tador	Laut Tador	Sei Suka	2.425.599.429
59.	SUPRA MATRA ABADI	PMDN	Tanah Datar Petatal (PTD)	-	-	2.049.289.833
60.	TOWER BERSAMA	PMDN	DUSUN VI	Tanjung Seri	Laut Tador	10.975.485.440
61.	UNEFECO	PMDN	Kantor Pusat Pabrik Peleburan PT. INALUM	Kuala Tanjung	Sei Suka	4.350.000.000
62.	DOMAS AGROINTI PRIMA	PMA	Jl. Access Road Inalum KM 15	Lalang	Medang Deras	2.643.342.804
63.	ENVIROTECH ENERGY ASIA	PMA	Jalinsum Dusun I Small Holder	Perjuangan	Sei Balai	-
64.	INDO BALAI GREEN ENERGY	PMA	Jalinsum Dusun I Small Holder	Perjuangan	Sei Balai	-
65.	JUST OIL & GRAIN INDONESIA	PMA	Jalan Pelabuhan No. 3, Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara 21257, Indonesia	Kuala Tanjung	Sei Suka	-

66.	KALTIMEX MOBIOL INDONESIA	PMA	POM Bakrie Sumatera Plantations Dusun 7 Perkebunan Sei Balai	Perkebunan Sei Balai	Sei Balai	3.672.728.496
67.	MARITIME NETWORK INDONESIA	PMA	JALAN ACCESS ROAD INALUM PINTU 10, KUALA TANJUNG	Kuala Tanjung	Sei Suka	-
68.	MULTIMAS NABATI ASAHAN	PMA	Access Road Dusun Sono	Lalang	Medang Deras	73.115.587.328
69.	PADI INDONESIA MAJU	PMA	Access Road Dusun Sono	Lalang	Medang Deras	423.026.711.381
70.	PANGANMAS INTI NUSANTARA	PMA	Jln. Acces Road Inalum, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara 21258 dengan daerah operasional seluruh Indonesia.	Lalang	Medang Deras	820.000.000
71.	PETRO ANDALAN NUSANTARA	PMA	Access Road Dusun Sono	Lalang	Medang Deras	149.917.151
72.	PRIMA TANGKI INDONESIA	PMA	PELABUHAN KUALA TANJUNG NO. 3	Kuala Tanjung	Sei Suka	15.683.598.683
73.	RENTOKIL INDONESIA	PMA	JL. Komplek Griya	Kuala Tanjung	Sei Suka	-
74.	SAWIT MAS AGRO PERKASA	PMA	Jalan Acess Road Inalum Km 15, Desa Lalang Kec. Medang Deras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 21258	Lalang	Medang Deras	-
75.	SEI BALAI GREEN ENERGY	PMA	Jalinsum Dusun I Small Holder	Perjuangan	Sei Balai	-
76.	SOCFIN INDONESIA	PMA	Desa Perkebunan Tanah Gambus	Perkebunan Tanah Gambus	Lima Puluh	23.841.825.714
77.	TELEKOMUNIKASI SELULAR	PMA	Jl. Sei serbu.	Pematang Jering	Sei Suka	14.118.533.811
TOTAL INVESTASI						887.708.259.190

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator	Satuan	Tahun2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	Nilai	86	88,41	102,80

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara melalui aplikasi si Sukma. Tahun 2025 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu 88,41 (kategori baik), dan jika dilihat dari target IKM untuk tahun 2025 yaitu 86, maka persentase yang diperoleh untuk Nilai IKM Tahun 2025, mencapai 102,80%, dengan kategori melebihi target

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Nilai IKM 86,63, maka terdapat peningkatan nilai IKM di tahun 2025. Perbandingan realisasi dan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun2024			Tahun2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	Nilai	85	86,63	101,92	86	88,41	102,80

Pencapaian kinerja persentase nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan didukung dengan adanya pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal, sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Persentase  
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARA N (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pelayanan Penanaman Modal	155.800.000	155.796.000	100	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Sesuai SP dan SOP
1.	Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	155.800.000	155.796.000	100	Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan
1)	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Eletronik	155.800.000	155.796.000	100	Pelaku usaha yang memiliki NIB dan Izin
	JUMLAH	155.800.000	155.796.000	100	

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi program/kegiatan penunjang capaian indikator tersebut, maka dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap realisasi anggaran program pelayanan penanaman modal, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	86	88,41	102,80	155.800.000	155.796.000	100	1,02

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja tersebut, yaitu :

1. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan melalui mobil pelayanan keliling
3. Melanangani layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
4. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Selain itu yang menjadi kendala atau yang harus ditingkatkan untuk pelayanan perizinan yaitu :

1. Literasi masyarakat terhadap penggunaan layanan perizin
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan
3. Ketersediaan SDM pada DPMPTSP yang belum memadai

Pelayanan Perizinan dan non perizinan serta perizinan berusaha, dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah izin yang terbit :

JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG DITERBITKAN  
DPMPTSP KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	JUMLAH
1	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	81
2	IZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL, DAN SEJENISNYA	-
3	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	-
4	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	-
5	IZIN KLINIK	1
6	IZIN LABORATORIUM KLINIK	-
7	IZIN UNIT PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	-
8	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	62
9	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	36
10	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	13
11	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS	-
12	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	174
13	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	127
14	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4
15	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	31
16	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	-
17	SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN	3
18	SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS	-
19	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	1
20	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	19
21	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANASTESI	2
22	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI	5
23	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS	-
24	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTRO MEDIS	-
25	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	1
26	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	2
27	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	6
28	SURAT IZIN KERJA KESEHATAN MASYARAKAT	3
29	SURAT IZIN TENAGA PENGOBATAN TRADISIONAL	-
30	SURAT IZIN TUKANG GIGI	-
31	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	54
32	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA	14
33	IZIN KURSUS KERETERAMPILAN	-
34	IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	3
35	IZIN KELEMBAGAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT	-
36	IZIN OPERASIONAL BIMBINGAN BELAJAR	-
37	IZIN OPERASIONAL RUMAH PINTAR	-
38	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	2
39	IZIN SANGGAR SENI	5
40	IZIN TRAYEK	-
41	PERSETUJUAN HASIL ANALISI DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)	-
42	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	2
43	IZIN KLINIK HEWAN	-
44	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT HEWAN	-
45	IZIN USAHA PERIKANAN	-
46	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	-

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	JUMLAH
47	IZIN REKLAME	30
48	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	36
49	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	-
50	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI	-
<b>TOTAL</b>		<b>717</b>

**JUMLAH IZIN BERUSAHA YANG DITERBITKAN OSS  
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025**

Bulan	Surat Izin yang diterbitkan (NIB)
Januari	107
Februari	123
Maret	94
April	100
Mei	412
Juni	466
Juli	290
Agustus	232
September	249
Oktober	219
November	215
Desember	361
Total	2868

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan juga dapat dilihat dari kinerja substansi pengaduan dalam menyelesaikan masalah yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2025. Semua pengaduan dimediasi untuk kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Dibawah ini kami tampilkan data pengaduan tahun 2025 yang telah dimediasi dan diselesaikan.

**DATA REKAPAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN TAHUN 2025**

BULAN	TANGGAL	NAMA PENGADU	JENIS PENGADUAN	YANG DIADUKAN	LOKASI PENGADUAN	PENANGANAN	HASIL
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	5 Juni 2025	DPC.LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia Kab. Batu Bara	Mohon informasi resmi	RAM Sawit (Timbangan Sawit)	Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh	Pada tanggal 13 Juni 2025 kita sudah mengeluarkan atau membalas surat kepada DPC LSM PMPRI Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Surat : 500.16.7.2/508/2025 dengan Perihal : Informasi	Surat sudah disampaikan langsung kepada Ketua DPC LSM PMPRI Kabupaten Batu Bara
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-
September	4 Sep 2025	Undangan dari Sekretaris Daerah	Rapat Dengar Pendapat terkait permasalahan pencemaran limbah	PT. Sawit Abadi Sentosa	Dusun Tanjung Mulia Desa Tanjung Gading Kec. Sei Suka	Pada tanggal 09 Sep 2025, Ketua Tim Pengaduan DPMPTSP Kab. Batu Bara sudah menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kab. Batu Bara Bersama dengan instansi Dinas PERKIM LH, Kepala Desa Tanjung Gading, Pihak Perusahaan PT. Sawit Abadi Sentosa dan para awak media	Pihak Perusahaan PT. Sawit Abadi Sentosa sudah memiliki surat izin, Dinas PUPR Kab. Batu Bara sebagai penentu boleh atau tidaknya berdiri usaha di lokasi tersebut, karena Dinas PUPR tidak diundang, maka rapat akan diadakan kembali sambil mengundang Dinas PUPR Kab. Batu Bara
	22 Sep 2025	Undangan dari Sekretaris Daerah	Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan penimbunan pasir	Galian C Pasir	Desa Kuala Tanjung Kec. Sei Suka	Pada tanggal 23 Sep 2025, Ketua Tim Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah menghadiri rapat tersebut di ruangan komisi IV DPRD Kab. Batu Bara	Rapat dengar pendapat di ruangan Komisi IV DPRD Kab. Batu Bara dihadiri oleh Ketua Komisi IV, beserta dari fraksi yang lainnya, dan Dinas PUPR, Dinas PERKIM LH, DPMPTSP, serta DPC LSM PMPRI. Karena

			ilegal				pihak Galian C tidak diundang dan Dirut Perusahaan Galian C tidak dapat dikonfirmasi maka rapat sementara ditunda
Oktober	3 Okt 2025	Undangan dari Sekretaris Daerah	Rapat dengar pendapat lanjutan terkait dugaan penimbunan pasir ilegal	Galian Pasir	C Desa Kuala Tanjung Kec. Sei Suka	Pada tanggal 6 Okt 2025, Ketua Tim Pengawasan DPMPTSP Kab. Batu Bara sudah menghadiri rapat tersebut di ruangan Komisi IV DPRD Kab. Batu Bara	Rapat dengar pendapat di ruangan Komisi IV DPRD Kab. Batu Bara dihadiri oleh Ketua Komisi IV beserta dari fraksi yang lainnya, Dinas PUPR, Dinas PERKIM LH, DPMPTSP, serta DPC LSM PMPRI, dan PPK sebagai pihak penggali Galian C, dimana hasil dari pertemuan tersebut adalah Galian C berada dalam Kawasan industri, sedangkan tanah yang diambil dari wilayah Simalungun sudah memiliki surat izin. Ketua Komisi IV langsung inisiatif dengan mengatakan bahwa pihak DPRD Kab. Batu Bara dan beberapa pihak instansi akan audiensi ke kantor PPK untuk memastikan izin yang dimiliki
	6 Okt 2025	Undangan dari Sekretaris Daerah	Tindak lanjut pembahasan pengaduan masyarakat terkait usaha/kegiatan PT. Sawit Abadi Sentosa	PT. Sawit Abadi Sentosa	Dusun Tanjung Mulia Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka	Pada tanggal 7 Oktober 2025 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sudah menghadiri rapat pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait usaha/kegiatan PT. Sawit Abadi Sentosa di ruangan Bapak Wakil Bupati Batu Bara	Rapat dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Batu Bara, Perwakilan dari Porles Batu Bara, Kejari Batu Bara (mewakili), Dinas PUPR, Dinas PERKIM LH, DPMPTSP. Hasil dari rapat tersebut dinyatakan bahwa perusahaan PT. SAS sudah memiliki izin (Izin Tata Ruang, Izin PBG, Izin Lingkungan), terkait dengan masalah limbah yang dikeluarkan oleh PT. SAS, Bapak Wakil Bupati Batu Bara memerintahkan supaya Dinas PERKIM LH melaporkannya ke dinas PERKIM LH Provinsi.

Nopember	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP	Nilai	76,25	76,25	100

Sasaran strategis 3 ini merupakan integritas dari beberapa unsur yang harus dicapai, yaitu: dengan meningkatkan Kinerja Lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana, Perencanaan Kinerja dan Keuangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 bahwa Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan kategori BB (sangat baiki) dengan nilai sebesar 76,25 (tujuh puluh enam koma dua puluh lima).

Jika realisasi nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 76,25 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 76,25, maka capaian indikator Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100% (mencapai target).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) yaitu realisasi Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 70,45, maka terdapat peningkatan nilai AKIP di tahun 2025. Perbandingan realisasi dan capaian nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batu Bara tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun2024			Tahun2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai	BB (71)	BB (70,45)	99,23	BB (76,25)	BB (76,25)	100

Pencapaian kinerja persentase nilai evaluasi AKIP Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara didukung dengan adanya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Persentase  
Nilai Evaluasi AKIP OPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota	4.772.294.534	4.002.690.686	83,87	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.345.099.768	2.080.188.212	88,70	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.333.593.423	2.070.502.012	88,73	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.506.345	9.686.200	84,18	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	20.202.000	84,18	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000	20.202.000	84,18	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.251.421	396.235.302	74,45	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	26.558.388	25.602.000	96,40	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

	Penerangan Bangunan Kantor				
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.958.039	93.985.251	86,26	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.938.422	72.497.600	87,41	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.065.000	57.360.000	45,14	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.631.572	53.538.075	98	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.000.000	26.000.000	63,41	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.100.000	67.252.376	73,82	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.276.245	546.270.665	71,38	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.099.500	99,85	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	648.076.245	479.171.165	73,94	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
3)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	0	0	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.177.100	688.264.883	88,33	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	Tersedianya jasa surat menyurat
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	429.287.100	345.624.883	80,51	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

	dan Listrik				
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.890.000	340.640.000	97,92	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.490.000	271.529.624	83,17	Terpeliharanya Barang Milik Daerah
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.890.000	125.356.250	89,61	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.000.000	44.090.000	52,49	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.600.000	102.083.374	98,50	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	JUMLAH	4.772.294.534	4.002.690.686	83,87	

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi program/kegiatan penunjang capaian indikator tersebut, maka dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja persentase nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara terhadap realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP OPD	76,25	76,25	100	4.772.294.534	4.002.690.686	83,87	0,99

Kemudian dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran ini pada masa mendatang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara perlu melakukan peningkatan cara penyajian laporan kinerja dengan sebaik mungkin mengikuti arahan atau rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai kaidah penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu yang menjadi kendala dalam rangka meningkatkan capain kinerja nilai AKIP OPD, yaitu ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum memadai baik dari kuantitas maupun SDM yang berkopetensi.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

#### A. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dan realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

No	BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
5.1	Belanja Operasi	5.249.232.289	4.374.515.521	83,34
5.1.01	Belanja Pegawai	2.333.593.423	2.070.502.012	88,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.915.638.866	2.304.013.509	79,02
	Jumlah Belanja Operasi	5.249.232.289	4.374.515.521	83,34
5.2	Belanja Modal	2.189.826.245	2.065.492.811	94,32
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.139.826.245	2.065.492.811	96,53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	50.000.000	0	0
	Jumlah Belanja Modal	2.189.826.245	2.065.492.811	94,32
	Jumlah Belanja	7.439.058.534	6.440.008.332	86,57

Realisasi Anggaran tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Badapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan pada Tahun 2025**

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>4.772.294.534</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>4.002.690.686</b>	<b>83,87</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.345.099.768</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.080.188.212</b>	<b>88,70</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang /bulan	2.333.593.423	15	Orang /bulan	2.070.502.012,00	88,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	Laporan	11.506.345	3	Laporan	<b>9.686.200</b>	84,18
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>24.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>20.202.000,00</b>	<b>84,18</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	24.000.000	1	Paket	20.202.000,00	84,18
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>7</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>532.251.421</b>	<b>7</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>396.235.302</b>	<b>74,45</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	26.558.388	12	Paket	25.602.000,00	96,40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	108.958.039	10	Paket	93.985.251,00	86,26
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Paket	82.938.422	4	Paket	72.497.600,00	87,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	127.065.000	10	Paket	57.360.000,00	45,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	54.631.572	12	Paket	53.538.075,00	98,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40	Dokumen	41.000.000	39	Dokumen	26.000.000,00	63,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	91.100.000	75	Laporan	67.252.376,00	73,82
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>765.276.245</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>546.270.665,00</b>	<b>71,38</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	67.200.000	1	Unit	67.099.500,00	99,85
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45	Unit	648.076.245	41	Unit	479.171.165,00	73,94
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	50.000.000			0,00	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>779.177.100</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>688.264.883,00</b>	<b>88,33</b>

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.000.000	4	Laporan	2.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	429.287.100	12	Laporan	345.624.883,00	80,51
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	347.890.000	12	Laporan	340.640.000,00	97,92
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>326.490.000</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>271.529.624,00</b>	<b>83,17</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	139.890.000	2	Unit	125.356.250,00	89,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit	84.000.000	9	Unit	44.090.000,00	52,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	102.600.000	1	Unit	102.083.374,00	99,50
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>108.684.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>101.626.525,00</b>	<b>93,51</b>
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>108.684.000</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>101.626.525,00</b>	<b>93,51</b>
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	108.684.000	1	Dokumen	101.626.525,00	93,51
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>155.800.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>155.796.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>155.800.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>155.796.000,00</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Eletronik	1250	Pelaku usaha	155.800.000	2868	Pelaku Usaha (NIB)	155.796.000,00	100,00
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>249.080.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>241.380.360,00</b>	<b>96,91</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>249.080.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>241.380.360,00</b>	<b>96,91</b>

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	Kegiatan usaha	49.475.000	5	Kegiatan usaha	45.400.000,00	91,76
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	192	Pelaku usaha	170.625.000	192	Pelaku usaha	170.160.360,00	99,73
Pengawasan Penanaman Modal	28	Kegiatan usaha	28.980.000	28	Kegiatan usaha	25.820.000,00	89,10
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.153.200.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.938.514.761,00</b>	<b>90,03</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.153.200.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.938.514.761,00</b>	<b>90,03</b>
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	2.153.200.000	1	Dokumen	1.938.514.761,00	90,03
			<b>7.439.058.534</b>			<b>6.440.008.332</b>	<b>86,57</b>

Dari tabel Realisasi Anggaran 2025 terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya (persentase kegiatan tidak mencapai 100%), hal ini dikarenakan pada sub kegiatan tersebut melekat anggaran untuk peresmian MPP, namun kegiatan peresmian MPP tersebut dilaksanakan secara serentak di Jakarta oleh Kemenpan RB (untuk 9 Kabupaten/Kota) dan virtual zoom, sehingga kegiatan peresmian MPP di Kabupaten Batu Bara tidak dilaksanakan. Pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terlaksana dikarenakan waktu pengerjaan yang tidak memadai. Namun demikian capaian target pada Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan baik (memenuhi target).

## B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dibebankan target retribusi sebesar **Rp 1.400.000.000,-** (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dan retribusi yang dicapai sebesar **Rp 2.207.215.598,-** (Dua milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). Realisasi retribusi tersebut berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persentase Pencapaian PAD terhadap target tersebut sebesar 157,66%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman untuk merencanakan program dan kegiatan serta pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta perizinan berusaha terus berupaya ditingkatkan, begitu juga dengan sarana dan prasarana, sedangkan untuk SDM/aparatur di DPMPTSP masih kurang memadainya. Secara umum, kinerja yang telah dicapai termasuk dalam kategori sangat baik. Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk dalam kategori sangat baik.

#### **4.2. Langkah-langkah strategis**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang, perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk perbaikan kinerja, antara lain :

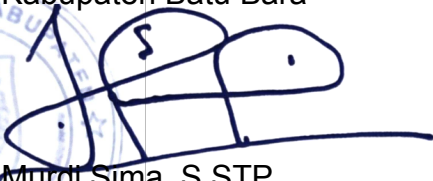
1. Penyediaan peta potensi investasi seluruh sektor dalam bentuk dokumen dan berbasis digital di Kabupaten Batu Bara
2. Penyediaan kajian peluang investasi
3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
4. Peningkatan monitoring kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
5. Membuat Data profil peluang investasi
6. Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi
7. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik dan investasi
8. Melakukan koordinasi organisasi perangkat daerah dengan provinsi dan pemerintah pusat
9. Meningkatkan kompetensi SDM

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun, semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk menjadi barometer keberhasilan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang

Lima Puluh, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Batu Bara



  
Murdi Sima, S.STP  
Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 197606021996121002